

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen pembiayaan sekolah swasta di kecamatan Tenggarong, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan di SDIT Nurul Ilmi dan SD Muhamamdiyah dimulai sejak akhir tahun ajaran baru atau awal tahun ajaran baru antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa SDIT Nurul Ilmi dan SD Muhammadiyah Tenggarong dalam penganggaran pembiayaan dimulai dari: (1) Pembentukan tim penyusun anggaran atau tim perumus RKAS oleh kepala sekolah. (2) Tim RKAS menganalisis biaya berdasarkan rencana kegiatan menurut tujuan pendidikan dan kebutuhan program penyelenggaraan pendidikan. (3) Tim penyusun membuat analisis kebutuhan biaya masing-masing program pendidikan. (4) Tim membuat rancangan RKAS dalam bentuk tertulis sebagaimana juklak dan juknis dari dinas pendidikan Kutai Kartanegara terkait penggunaan BOSNAS dan BOSKAB. (5) Hasil rancangan dirapatkan dengan melibatkan seluruh perwakilan guru (para koordinator/kepala bidang), komite sekolah, dan yayasan. (6) Terakhir proses legitimasi pihak berwenang yaitu dari pihak dinas pendidikan Kutai Kartanegara dan Pimpinan Yayasan. Berbeda dengan MI Asy Sayuqi belum ditemukan proses penyusunan anggaran madrasah secara sistematis, kepala sekolah hanya mengundang guru lalu dimintai kebutuhan masing-

masing guru kemudian RKAS diolah oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah berdasarkan kekuatan dana yang bersumber dari pemerintah yaitu dana BOSNAS dan BOSKAB. penganggaran disesuaikan dengan juklak dan juknis dari dinas Pendidikan Kutai Kartaengara dan Kementerian Agama. Adapun dana yang bersumber dari yayasan seutuhnya dikelola oleh pihak yayasan dan dioperasikan langsung oleh yayasan melalui bendahara yayasan untuk kesejahteraan guru dan kariawan sesuai kebijakan pimpinan yayasan. Jadi dari hasil analisis terdapat perbedaan pengelolaan dalam proses perencanaan anggaran pembiayaan dari ketiga lembaga pendidikan tersebut disebabkan karena faktor intern masing-masing lembaga dalam pengelolaan sumber keuangan sekolah. MI Asy Syauqi masih terlihat sederhana dalam pengelolaan dikarenakan kesiapan perangkat SDM Asy Syauqi yang masih belum tersedia secara maksimal. Sebab Asy Syauqi masih dalam proses menuju perkembangan ke arah yang lebih baik. MI Asy Syauqi masih fokus dalam menambah kuantitas siswa dan kualitas pembelajaran dibidang Agama. Namun dalam prestasi akademik secara keseluruhan dan perencanaan pengelolaan keuangan sekolah masih harus rendah hati untuk belajar dari kedua kompetitornya yaitu SDIT Nurul Ilmi dan SD Muhammadiyah Tenggarong.

2. Alokasi Penggunaan Anggaran pembiayaan pendidikan dari ketiga sekolah/madrasah telah merealisasikan sebagaimana juklak dan juknis dari pemerintah dan pimpinan yayasan. Adapun alokasi anggaran SDIT Nurul Ilmi, SD Muhammadiyah dan MI Asy Syauqi Tenggarong menggunakan

semua sumber pembiayaan untuk: (1) gaji guru/pegawai (2) peningkatan kompetensi guru (3) peningkatan sarana pembelajaran (4) pembangunan sarana sekolah (5) penunjang kegiatan kesiswaan, dan (6) biaya pengelolaan. Dari hasil analisis terdapat perbedaan mekanisme dalam mengalokasikan semua sumber pembiayaan sekolah sebagaimana kebijakan dari masing-masing pimpinan lembaga. Namun tidak mengurangi substansi dari realisasi anggaran pembiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam juklak dan juknis dinas pendidikan Kutai Kartanegara.

3. Alur pertanggungjawaban SDIT Nurul Ilmi, SD Muhammaidyah dan MI Asy Syauqi Tenggarong yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban tertulis baik secara manual maupun online jika terkait dana BOSKAB dan BOSNAS, kemudian laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan disampaikan kepada pihak pimpinan yayasan, dinas pendidikan kabupaten, kementerian Agama bagi MI Asy Syauqi dan kepada komite sekolah. Kemudian untuk pertanggungjawaban kepada publik khususnya kepada wali siswa dari masing-masing lembaga menggunakan papan informasi sebagai media untuk menempel realisasi dari alokasi penggunaan sumber pembiayaan atau wali murid diperkenankan langsung bertanya ke pihak sekolah.

## B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi sekolah/madrasah
  - a. Bagi sekolah terkait manajemen pembiayaan pendidikan, perlu kiranya untuk selalu melaksanakan proses penganggaran sekolah secara sistematis dan prosedural. Sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekolah bersama pihak yayasan hendaknya senantiasa duduk bersama dalam merencanakan seluruh pengembangan sekolah agar senantiasa bersinergi dalam meraih kemajuan sekolah dan senantiasa mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan sehingga mengetahui letak kelebihan dan kekurangan serta hambatan dalam melaksanakan pembiayaan.
  - b. Dengan perbedaan cara pengelolaan sumber pembiayaan dan proses penganggaran sebaiknya harus senantiasa *up to date* dalam mengikuti perkembangan manajemen pembiayaan sekolah dengan senantiasa melakukan studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah teruji manajemen pembiayaannya sehingga kedepan mengarah kepada manajemen pembiayaan pendidikan yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kepada pihak pemerintah harus dapat mengawasi dengan baik penggunaan dana yang diberikan kepada sekolah agar tepat dan sesuai dengan penggunaan sebagaimana aturan yang berlaku. Selain itu pemerintah harus memperhatikan alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah agar dapat menunjang

penyelenggaraan pendidikan yang optimal dan berkualitas, agar pengelolaan dana pendidikan dapat terlaksana berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

### 3. Penelitian Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor-faktor lain yang berkaitan dan berkontribusi dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan.